

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan potensi lautnya yang sangat besar, semestinya memberikan harapan, terutama masyarakat nelayan yang mana menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan kekayaan kelautan yang demikian besar, rasanya tidak percaya jika ternyata belum mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kriteria miskin tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak.

Di lain sisi Indonesia memiliki total luas laut sekitar 3,544 juta km² dan memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya. Diperkirakan pendapatan dari sektor perikanan mencapai US\$ 82 miliar per tahun, perikanan juga memberikan lapangan kerja yang tidak kecil karena mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri dari 2,23 juta nelayan laut; 0,47 juta nelayan perairan umum; dan 2,65 juta pembudi daya ikan. Masalah kemiskinan masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi karena cukup beragam sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan

bukan solusi secara parsial. Untuk menyelesaikannya harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat nelayan, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat (Ayu Mentari Suryadi & Sufi, 2019).

Sebagai salah satu negara kepulauan yang didominasi oleh lautan, Indonesia memiliki potensi besar di bidang perikanan dan kelautan. Potensi perikanan dan kelautan ini berperan penting dan strategis bagi pembangunan nasional Indonesia, karena memengaruhi banyak aspek seperti ekonomi, keamanan, ekologi dan sosial. Selain itu, dampak langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan dan kelautan. Di Indonesia sebagian besar masyarakat yang hidup di wilayah pesisir menggantungkan kehidupannya pada hasil laut. Dengan kata lain apabila masyarakat tidak bekerja di bidang lain, maka mereka mengandalkan sektor kelautan maupun perikanan sebagai mata pencahariannya. Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia, apabila telah diatur dan dikelola secara baik, harapannya dapat membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Namun, berdasarkan data hasil Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 diketahui bahwa nelayan termasuk salah satu profesi paling miskin di

Indonesia. Sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor pelayanan restoran yaitu 5,56%, konstruksi bangunan di angka 9,86%, serta pengelolaan sampah dengan persentase 9,62% (Anna,2020). Penyebab kemiskinan nelayan sendiri di antaranya sumber daya manusia yang masih kurang berkualitas, kekurangan atau keterbatasan modal usaha, teknologi hasil tangkapan yang cenderung masih tradisional, keterbatasan kapasitas dan sumber daya pengelola, kondisi alam dan perubahan musim yang tidak pasti memaksa nelayan untuk tidak melaut sepanjang tahun sehingga menyebabkan hasil tangkapan yang tidak konsisten dan mengganggu pendapatan nelayan (Hamdani & Wulandari,2013).

Nelayan tradisional pada umumnya hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ciri yang melekat pada mereka yaitu kondisi usaha yang subsisten, modal kecil, teknologi sederhana dan bersifat one day fishing (Susilowati, 2002). Selanjutnya, Fauzi (2003) mengatakan bahwa teknologi penangkapan yang masih sederhana mengarah pada penghasilan nelayan yang rendah. Rendahnya penghasilan nelayan tradisional merupakan masalah yang sudah lama, namun masih belum dapat diselesaikan hingga sekarang.

Townsend (1954) menjelaskan bahwa keluarga yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum tergolong rumah tangga miskin primer. Pada sektor kelautan dan perikanan, pendekatan nilai tukar nelayan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dari Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat perikanan (Saptanto dan Apriliani, 2012). Terkait dengan pendapatan, besarnya pendapatan antar rumah tangga nelayan dapat saja berbeda walaupun karakteristik usaha sama. Ketimpangan pendapatan antar rumah tangga menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan tingkat kesejahteraan antar rumah tangga dalam suatu wilayah. Ketimpangan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi (Suherman, 2002).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Kusnadi (2002) kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal.

Oleh karena itu diperlukan upaya perubahan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tidak memperhatikan keadaan riil masyarakat, tetapi sering kali didasarkan program - program intervensi. Pengertian partisipasi secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota dalam suatu kegiatan (Mardikanto, 1993) Partisipasi melalui keikutsertaan nelayan dapat menjadi

cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan suatu program penyuluhan. Nelayan dianjurkan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan program penyuluhan karena mereka memiliki informasi yang penting untuk merencanakan program termasuk tujuan, situasi, pengetahuan serta pengalaman dengan teknologi dan penyuluhan serta struktur sosial masyarakat mereka (Nur Hayati, dkk 2018).

Konsep partisipasi nelayan menurut Jentoft dan Chuenpagdee (2009) menyebutkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dijelaskan sebagai solusi untuk menghadapi kompleksitas masalah perikanan yang sulit dipecahkan. Partisipasi nelayan mencakup berbagai aspek, mulai dari keterlibatan dalam perencanaan kegiatan penangkapan ikan hingga pengawasan terhadap penangkapan ikan yang mematuhi aturan. Selain itu, nelayan juga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan terkait penetapan kuota penangkapan ikan, zona penangkapan ikan, dan kebijakan perikanan. Partisipasi nelayan bukan hanya penting untuk mengatasi masalah-masalah perikanan, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan, mengurangi konflik, dan mencapai keberlanjutan ekologis.

Dengan kata lain, partisipasi nelayan adalah elemen kunci dalam upaya untuk mengelola perikanan sebagai masalah yang sulit, di mana kolaborasi dan keterlibatan semua pihak yang terlibat menjadi penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Dengan adanya partisipasi nelayan, maka pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif,

sehingga pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, partisipasi nelayan dalam pengembangan perikanan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan nelayan, serta memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal.

Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang notabennya bermata pencaharian sebagai nelayan, secara menyeluruh bergantung pada hasil tangkapan ikan dilaut yang secara kalkulasi tidak dapat memberikan hidup yang layak, tidak terlepas dari berbagai alasan yang mendasarinya, pertama, masyarakat nelayan di Desa Sapeken secara umum kerap kali diposisikan sebagai masyarakat dimarginalkan dalam segala aspek, terjadi kesenjangan yang sangat suram antara masyarakat kota dengan masyarakat kepulauan seperti masyarakat yang ada di pulau terpencil terisolir seperti pulau Sapeken, kedua, masyarakat nelayan kepulauan adalah masyarakat terpencil secara geografis dengan segala keterbatasan yang tidak pernah dijadikan sebagai daerah prioritas dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan pembangunan kemasyarakatan, jauhnya dari pusat kota serta tidak menentunya alat transportasi mengakibatkan tidak tersentuhnya permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut oleh pihak yang bertanggung jawab, tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik, Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia (Adawiyah,2015).

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk dari peran komunitas nelayan oncor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga berbasis partisipasi dengan fokus analisis pada komunitas nelayan oncor di Desa Sapeken. Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat dari segi pengembangan teknologi, kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Dengan adanya program-program partisipasi nelayan melalui komunitas dapat menciptakan proyek intervensi dalam upaya menciptakan kemakmuran dan pemerataan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana peran komunitas nelayan oncor sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga berbasis partisipasi di Desa Sapeken ?
2. Apa saja masalah yang dihadapi komunitas nelayan oncor berbasis partisipasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran dan penjelasan tentang peran komunitas nelayan oncor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga berbasis partisipasi, serta mendapatkan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi dalam komunitas nelayan oncor berbasis partisipasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pengembangan pengetahuan khususnya dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial terutama terkait partisipasi nelayan dalam komunitas nelayan oncor sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi kalangan ilmuan dan mahasiswa, serta tambahan refrensi bagi literasi permasalahan sosial khususnya pemberdayaan nelayan melalui komunitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa jurusan Kesejahteraan Sosial, menentukan kebijakan dan rencana intervensi dalam praktik pekerjaan sosial terhadap penyandang penyelesaian masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah nelayan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan ruang lingkup penelitian agar peneliti tidak luas dan lebih focus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini hanya menggambarkan partisipasi

nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui komunitas. Supaya konsep yang ada dalam penelitian ini jelas, maka diperlukan Batasan/ruang lingkup penelitian. Adapun Batasan yang telah disepakati serbagai berikut:

1. Desa Sapeken

Sapeken adalah sebuah kecamatan di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah ini terletak di bagian paling ujung . Uniknya, penduduk di Kepulauan Sapeken ini berbahasa Sulawesi (bahasanya: bahasa Bajau, bahasa Mandar dan sebagian kecil berbahasa Bugis) bukan berbahasa Madura karena dalam sejarahnya orang Sulawesi yang menemukan kepulauan ini. Begitu juga dengan kultur budaya sangat berbeda dengan budaya Madura, rata-rata suku yang ada di Kepulauan Sapeken (Kecamatan Sapeken) Suku Bajau, suku Mandar dan suku Bugis. Kepulauan Sapeken ini terletak di sebelah utara Bali.

Nama sapeken hingga dewasa ini masih dalam kontroversi. Ada versi yang mengaitkan asal kata sapeken dengan kata se-pekan, merujuk pada sebuah cerita tentang para pendatang yang bersinggah selama satu pekan (7 hari).

Namun, versi ini mengandung kelemahan karena tidak menyebutkan dari mana asal para pendatang itu sehingga mereka sampai di pulau mungil nan elok yang telah menjadi ibu kota kecamatan paling timur di Kabupaten Sumenep ini.

Versi lain, dan cukup jelas adalah cerita yang mengaitkan nama sapeken dengan cerita tenggelamnya sebuah bahtera sejumlah pelaut yang berlayar dari Sulawesi. Mereka lalu terdampar ke pantai sebuah pulau yang akhirnya mereka beri nama sapeken (bahasa Sama Bajau: si-pakkan), artinya yang tenggelam. Para pelaut dari Sulawesi tersebut adalah suku Bajau Sulawesi Selatan. Penggal cerita ini menjadi petunjuk yang mendekati kebenaran historis untuk menemukan asal-usul penduduk asli kepulauan Sapeken, yang memang secara etnik berasal dari suku-suku di Sulawesi Selatan. Yaitu, Bugis, Mandar dan Bajau. Kehidupan masyarakat Sapeken yang banyak berhubungan dengan laut menyebabkan masyarakat tersebut sebagai pekerja keras dan menyukai tantangan. Meskipun tingkat pendidikan mereka rendah, tapi budaya kerja yang tinggi menyebabkan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan mudah (Muchammad, 2018).

2. Profil komunitas KNO dalam partisipasi nelayan

Komunitas merupakan kelompok sosial dari berbagai organisme dengan bermacam-macam lingkungan, pada dasarnya mempunyai habitat serta ketertarikan atau kesukaan yang sama. Di dalam komunitas, individu-individu di dalamnya mempunyai kepercayaan, kebutuhan resiko, sumber daya, maksud, preferensi dan berbagai hal yang serupa atau sama. Menurut Kertajaya (2008), komunitas adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dapat diartikan bahwa komunitas adalah kelompok orang yang saling mendukung dan saling membantu antara satu sama lain.

Menurut Santoso (2009), Kelompok sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Komunitas juga suatu sistem sosial yang meliputi sejumlah struktur sosial yang tidak terlembagakan dalam bentuk kelompok atau organisasi dalam pemenuhannya melalui hubungan kerjasama struktural, komunitas dapat berdiri sendiri dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang lebih besar.

Komunitas nelayan oncor atau yang disingkat dengan KNO adalah sebuah organisasi berbasis komunitas yang menaungi para nelayan oncor yang beradada di Desa Sapeken Kecamatan Sapeken. Organisasi ini berdiri pada tahun 2017 dan mempunyai struktural yang dimana ada tiga jabatan yaitu mulai dari ketua, wakil dan bendahara. Organisasi ini dibentuk atas dasar tanggapan dari para pemancing asing yang menggunakan cara berlebihan seperti pukat harimau atau *trawl* yang dinilai dapat merusak populasi ikan dan ekosistem laut lainnya.

3. Partisipasi Nelayan Melalui Komunitas

Menurut Aprilia (2014), partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Isbandi Rukmianto (2007) berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat adalah adanya kebersamaan dan saling memberikan sumbangan untuk kepentingan yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri (Annissa dkk,2020).

Komunitas nelayan golongan yang di belenggu dengan masalah kemiskinan, karena mereka sangat tergantung dengan hasil laut, Ketergantungan akan hasil tangkapan, sukar memberi keuntungan yang tinggi, di tambah dengan faktor ketidaktentuan hasil tangkapan. Nelayan tradisional tidak ada kemahiran sehingga tidak mempunyai alternatif pekerjaan. Mereka bekerja hanya mengisi kesempitan hidup. Berbagai problematika di atas, disebabkan program belum berkesinambungan khususnya belum tertumpu bantuan pemerintah kepada nelayan tradisional (Aisyah 2014 dan Aisyah 2021).

4. Kesejahteraan Keluarga Nelayan

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya. Kemudian, menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan didefinisikan bahwa

setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (Ikhwan, 2005).

Menurut Jentoft (1988) dalam buku *Social theory and fisheries co-management* mengatakan kesejahteraan keluarga nelayan adalah kondisi di mana keluarga yang menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian di sektor perikanan merasakan kehidupan yang layak dan bahagia. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk stabilitas ekonomi keluarga yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Selain itu, kesejahteraan keluarga nelayan juga mencakup kualitas hubungan antaranggota keluarga, dukungan sosial dari komunitas, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Mereka juga harus memiliki lingkungan yang sehat dan lestari di sekitar perairan tempat mereka bekerja.